



Diplomasi Soft Power Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group terhadap United Liberation Movement for West Papua

Muhammad Afif Maulana Roziqi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website

<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACT

Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands and Vanuatu are countries in the South Pacific that share ethnic, racial and cultural similarities. With historical burden that had been colonized by the western nations, they formed the MSG to take their own sovereignty. Papua which is part of Indonesia have Melanesian ethnicity are considered to have no sovereignty of their own. So ULMWP wants to get independence from Indonesia and got supported by several MSG member countries. Therefore, Indonesia has an interest to cease ULMWP by approaching MSG members using Soft Power. Soft Power is a way to get the desired results through cultural, domestic values and foreign policy. This research argues that Indonesia use cultural and foreign policy that have succeeded in reducing some member of MSG support to ULMWP

Keywords: *Soft Power, Indonesia, MSG, ULMWP*

PENDAHULUAN

MSG (*Melanesia Spearhead Group*) merupakan organisasi regional antarpemerintah yang terbentuk dari pertemuan informal Kepala Pemerintahan Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan FLNKS (*Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste*) di Goroka, Papua Nugini pada 17 Juli 1986. Pada 23 Maret 2007, MSG secara resmi terbentuk setelah setiap anggota menandatangani *the Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group* di bawah hukum internasional. Sebelum terbentuk, MSG bekerja secara *ad hoc* hingga akhirnya bermarkas di Port Villa, Vanuatu. Organisasi antarpemerintah ini bertujuan untuk menghimpun negara yang memiliki identitas yang sama untuk mencapai tujuan bersama yang salah satunya adalah keamanan (MSG, n.d.).

Indonesia yang memiliki berbagai macam etnis dan ras yang salah satunya adalah Melanesia. Warga Melanesia di Indonesia yang berjumlah hampir 11 juta ini banyak tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Karena keberadaan ini, Indonesia memiliki kedekatan dengan negara anggota MSG. Melalui Dubes A.M Farchir, Indonesia menegaskan komitmen serius Pemerintah untuk memajukan kerjasama konkrit dengan negara-negara anggota MSG (Kemlu, 2012). Hubungan tersebut semakin membaik ketika Indonesia bergabung menjadi *observer* pada MSG Leader Summit ke-18 di Fiji tanggal 31 Maret 2011 (MSG, 2011). Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2015 yang bertepatan dengan MSG Leader Summit ke-20 di Kepulauan Solomon. Indonesia ditetapkan menjadi *Associate Member* (Kemlu, 2015).

Akan tetapi, alasan keberadaan Etnis Melanesia di Indonesia tidak bisa dijadikan tolok ukur Indonesia mau bergabung dengan MSG. Hal ini dikarenakan tidak semua warga

Melanesia sejalan dengan pemerintah Indonesia. Di Papua Barat sendiri, ada kelompok yang sangat berseberangan dengan pemerintah Indonesia. Kelompok ini menamakan dirinya sebagai ULMWP (*United Liberation Movement for West Papua*). Berdasarkan pertanyaan ketua ULMWP Benny Wenda, kelompok ini bertujuan untuk kemerdekaan dan kebebasan bagi warga Papua Barat (ULMWP, n.d.). Bagi pemerintah Indonesia, kelompok ini dianggap sebagai kelompok separatis yang hanya mewakili sebagian kecil dari warga Papua di luar negeri. Seperti yang disampaikan oleh M.I. Derry Aman, Wakil Kepala Perwakilan RI di KBRI Canberra selaku Ketua *Senior Official Meeting* RI sebelum pertemuan tingkat menteri di MSG. Bahkan pemerintah Indonesia tidak pernah menyebut ULMWP di hadapan publik. Pemerintah Indonesia cenderung menggunakan “gerakan separatis” terhadap kelompok ini (Dewi, 2018). Kelompok ini berhasil masuk karena ada dukungan dari beberapa aktor internasional seperti Vanuatu dan FLNKS. Meski begitu, keanggotaan ULMWP masih dipermasalahkan mengingat kelompok ini hanyalah peninjau yang mewakili sekelompok kecil separatis yang bedomisili di luar negeri (Firmansyah, 2018). Situasi ini menyebabkan dilema bagi Indonesia. Disatu sisi, Indonesia mau menjalin hubungan baik dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Namun, di sisi lain dalam MSG terdapat kelompok separatis dan beberapa negara yang mendukungnya.

Penelitian ini membahas cara Indonesia mempengaruhi negara anggota MSG dengan *soft power*. Penelitian ini menjelaskan pendekatan Indonesia melalui budaya, nilai-nilai dalam negeri, dan kebijakan luar negeri yang membangun *soft power*. Dengan *soft power*, Indonesia dapat mempengaruhi, menarik perhatian, membujuk, dan membuat pihak lain untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan. Kepentingan dalam negeri Indonesia adalah membendung berkembangnya ULMWP di Melanesia khususnya diakui sebagai anggota MSG. Dengan kehadiran Indonesia sebagai wakil dari masyarakat MSG, maka akan melemahkan posisi ULMWP di MSG.

Penelitian ini menggunakan konsep *soft power* yang digagas oleh Joseph S. Nye. *soft power* adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menarik perhatian, membujuk, dan membuat orang lain untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan. Untuk mendapatkan *soft power*, maka dibutuhkan tiga instrumen utama yaitu budaya, nilai-nilai dalam negeri, dan kebijakan luar negeri. Dengan adanya ketiga instrumen tersebut, maka *soft power* akan terbentuk.

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yakni mengumpulkan data-data sekunder dari buku, artikel jurnal, majalah, koran, dan artikel daring dengan menggunakan sumber-sumber yang kredibel.

PEMBAHASAN

Isu kemerdekaan Papua merupakan isu yang kerap diangkat di forum internasional terutama MSG. Kesamaan etnis, ras dan budaya Melanesia menjadi alasan untuk mendukung kemerdekaan Papua. Ditambah dengan kehadiran ULMWP sebagai organisasi yang secara legitimasi mendukung kemerdekaan Papua di MSG. Dengan hadirnya ULMWP, maka negara-negara anggota semakin gigih menyuarakan kemerdekaan di setiap pertemuan. Akan tetapi, pembahasan tersebut selalu mengalami kebuntuan. Salah satu kebuntuan tersebut diakibatkan Indonesia sebagai aktor negara memberikan pengaruh yang kuat dengan tergabung menjadi *associate member* dan menggunakan *soft power* untuk mempengaruhi negara-negara anggota lainnya. *Soft power* terdiri dari tiga instrumen yaitu budaya, nilai-nilai dalam negeri, dan kebijakan luar negeri. Dengan adanya ketiga instrumen tersebut, maka akan tercipta *soft power* yang berarti kemampuan menarik minat pihak lain agar pihak lain terpengaruh sehingga mengeluarkan kebijakan yang diinginkan. Sehingga negara dapat mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Dalam hal ini, Indonesia memiliki tujuan kebijakan luar negeri dengan membendung keanggotaan ULMWP di MSG.

Soft power Indonesia yang paling kuat terhadap negara anggota MSG adalah budaya. Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur memiliki budaya tradisional yang serupa dengan negara anggota MSG. Kedua belah pihak juga memiliki kepentingan yang sama untuk saling mempromosikan budaya kepada dunia internasional karena wilayah ini jarang dari perhatian internasional (BPNBBali, 2015). *Soft power* budaya Indonesia juga tersalurkan dengan perdagangan dan pendidikan. Perdagangan dan pendidikan memiliki kesamaan melalui hubungan langsung, kunjungan, dan pertukaran. Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) adalah salah satu program pemerintah Indonesia untuk membangun citra baik kepada para warga asing yang ingin mempelajari kebudayaan Indonesia (Kurnia, 2016, pp. 35-40).

Indonesia mengembangkan budaya Melanesia dengan mengadakan Festival Budaya Melanesia pada tahun 2015. Pada 27-29 Oktober 2015, Pemerintah Indonesia melalui Kemdikbud menyelenggarakan Festival Budaya Melanesia pertama di Kupang, NTT. Festival ini dihadiri oleh Timor Leste, Vanuatu, Kaledonia Baru, Kepulauan Salomon, Fiji dan Papua Nugini (Bere, 2015). Festival ini diisi dengan peluncuran dan bedah buku “Diaspora Melanesia di Nusantara”, temu budaya, pameran budaya dari masing-masing negara serta seminar yang dihadiri oleh pemateri yang sudah menguasai betul mengenai Melanesia (BPNBBali, 2015).

Negara-negara Melanesia juga mengadakan *Melanesian Arts and Cultural Festival* (MACFest) 6th pada 1-10 Juli 2018 di Honiara, Kepulauan Solomon dengan tema “*Past Recollections; Future Connections*” dan dilakukan setiap empat tahun. Festival ini melibatkan 2000 seniman dari negara-negara Melanesia dan memperluas partisipan dengan mengundang seniman Indonesia dari Provinsi Papua dan Papua Barat. MACFest ditujukan membantu kaum muda untuk melestarikan seni dan budaya dan menanamkan rasa bangga pada identitas diri sebagai orang Melanesia serta timbul interaksi budaya dan menciptakan pemahaman tentang berbagai budaya Melanesia

Dengan diadakannya Festival Budaya Melanesia 2015 dan partisipasi MACFest 2018, Indonesia ingin membuktikan keseriusan dalam mempererat kerjasama dengan negara anggota MSG. Festival Budaya Melanesia 2015 memberikan pesan kepada dunia yang menyoroti adanya kerjasama budaya antara Indonesia dan Melanesia. Festival ini juga menekankan pentingnya kerjasama budaya untuk mempererat persaudaraan Melanesia. Festival ini juga menegaskan Indonesia dan negara Melanesia berkomitmen untuk membangun kerjasama yang baik selayaknya membangun budaya tradisional dan nilai-nilai antarMelanesia dengan memprhatikan Papua sebagai kebhinekaan Indonesia (Onwestpapua.com, 2018).

Selanjutnya, BSBI sebagai salah satu program pemerintah Indonesia merupakan salah satu bentuk pelaksanaan *soft power* Indonesia melalui budaya. Dalam program ini, peserta dari berbagai negara berkumpul untuk mempelajari budaya Indonesia. Program ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan akan budaya Indonesia ke dalam diri para peserta. Tahapan program BSBI yang relatif cukup lama secara tidak langsung membuat interaksi antar peserta juga semakin intensif sehingga terjadi pertukaran kebudayaan diantara delegasi kebudayaan dalam membina hubungan satu sama lain. Hal ini kemudian memungkinkan peserta masing masing mengetahui pandangan satu sama lain dengan cara yang damai. Hubungan kebudayaan dapat membawa bangsa-bangsa peserta menjadi lebih dekat (Kurnia, 2016, pp. 35-40).

Pada paragraf sebelumnya telah disebutkan bahwa kesenian kebudayaan juga dapat berperan sebagai media yang efektif dalam meningkatkan investasi negara. Investasi diartikan sebagai para peserta BSBI yang membangun *friends of Indonesia* melalui *people to people contact* (Kemlu, 2011). Dengan keikutsertaan peserta dari berbagai penjuru dunia, Indonesia akan membangun citra baik melalui *soft power* budaya. Langkah Indonesia dalam memanfaatkan budaya sebagai *soft power* adalah pertama, Indonesia membangun opini publik dengan menunjukkan rasa aman dan damai. Kedua, para peserta akan menjadi agen budaya Indonesia dan ikut melestarikan budaya. Ketiga, dengan peserta menjadi promotor dalam mempromosikan budaya Indonesia di negara masing-masing.

Langkah Indonesia dalam memanfaatkan *soft power* yang pertama yaitu opini publik yang berpengaruh dalam masyarakat terutama di era informasi. Pada era ini Pendapat masyarakat dapat secara efektif mempengaruhi tindakan pemerintah. BSBI sebagai salah satu program pemerintah diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam mengatasi permasalahan ini melalui jalur kebudayaan. Potensi kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia dianggap sebagai kekuatan diplomasi Indonesia yang dapat memulihkan citra Indonesia di dunia Internasional (Kurnia, 2016, pp. 35-40).

Kedua, BSBI juga menjadikan peserta sebagai agen budaya. Pendekatan pendidikan dilakukan dalam rangka menanamkan kecintaan terhadap kebudayaan Indonesia. Kecintaan terhadap kebudayaan Indonesia akan membuat para peserta dengan suka rela ikut melestarikan budaya Indonesia. Dengan tinggal di Indonesia dan mempelajari kebudayaan Indonesia, secara alamiah akan tumbuh kecintaan dan perasaan memiliki di hati para peserta dan alumni BSBI. Kecintaan terhadap Indonesia inilah yang nantinya akan membuat para peserta dan alumni BSBI dengan sukarela membagikan cerita positif tentang Indonesia di negaranya masing-masing (Kurnia, 2016, pp. 35-40).

Ketiga, setelah memahami seni dan budaya Indonesia, para peserta yang telah mengikuti program BSBI di Indonesia, diharapkan dapat menjadi agen budaya Indonesia di negaranya masing-masing dengan ikut mempromosikan Indonesia di negaranya masing-masing. Dengan begitu, secara tidak langsung Program BSBI ini bisa mengurangi atau mencegah munculnya klaim negara lain terhadap seni dan budaya Indonesia. Dan yang terpenting, BSBI dapat menciptakan pandangan baik masyarakat dunia kepada Indonesia melalui seni dan budaya (Kurnia, 2016, pp. 35-40)..

Indonesia memiliki *soft power* nilai-nilai dalam negeri di Papua. Nilai-nilai tersebut mulai dikembangkan setelah masa reformasi karena tidak diberlakukannya cara-cara militer dan semakin berkembangnya isu kemerdekaan Papua di internasional. Pertama, Indonesia mengembangkan Papua melalui otonomi khusus. Kedua, budaya Papua merupakan bagian dari kebhinekaan yang dimiliki Indonesia. Ketiga, pembangunan infrastruktur untuk pemerataan dan pengembangan Papua. Keempat, peningkatan HAM, serta mulai melibatkan masyarakat Papua di pemerintahan pusat.

Otonomi khusus Papua diberikan setelah reformasi mengingat pendekatan Orde Baru menggunakan cara militer. Pada November 2001, pemerintah Indonesia dan DPR menetapkan UU No. 21 tahun 2001 Tentang otonomi khusus Provinsi Papua. Otonomi ini memberikan kekuasaan yang cukup signifikan kepada pemerintah lokal dan menjamin hak budaya dan agama bagi warga. Selain itu juga menjamin bahwa 80 persen dari pendapatan hutan, perikanan, dan pertambangan serta 70 persen dari pendapatan minyak dan gas diberikan kepada otoritas lokal. UU Otonomi Khusus juga menjamin hukum adat dan membentuk institusi untuk menampung aspirasi Papua dan menjamin hak suku yang tertindas (Suryawan, 2011, pp. 143-144).

Dengan adanya UU otonomi khusus, "Papuanisasi" akan diterapkan segera bagi seluruh rakyat Papua agar dapat mengurus diri sendiri. UU Otonomi Khusus menetapkan bahwa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, MRP adalah orang Papua asli. Begitu juga dengan rekrutmen birokrasi sipil harus memberikan prioritas bagi penduduk asli. Dengan demikian, persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di Papua akan diatasi dan diawasi oleh orang Papua sendiri dengan dukungan UU otonomi khusus (Pulungan, 2003). Dengan begitu, otonomi memberikan nilai tambah bahwa masyarakat Papua memang diperhatikan dan menjadi bagian dari Indonesia.

Namun, meningkatkan perekonomian rakyat tidak hanya melalui otonomi khusus dan kebhinekaan budaya, pembangunan infrastruktur demi pemerataan dan peningkatan taraf hidup juga memberi nilai tambah untuk membangun Papua. Dengan pembangunan infrastruktur, Indonesia semakin menguatkan posisi di Papua. Pembangunan ini semakin membuka Papua

bagi seluruh pihak. Tersambungannya berbagai wilayah di Papua dengan jalan trans Papua dan peningkatan fasilitas perbatasan, maka akan meningkatkan interaksi antarmasyarakat.

Pembangunan Papua khususnya Trans Papua sudah mulai dirancang dan dikerjakan pada era Soeharto tahun 1980-an. Jalan antar kabupaten atau kota ini mulai dibangun dari Jayapura ke Wamena yang bertujuan untuk membuka keterisolasian sehingga mempermudah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan selanjutnya. Melalui jalur darat, pemecahan biaya distribusi yang tinggi dapat terselesaikan. Bappenas menyatakan sangat serius untuk berkontribusi dalam pengembangan wilayah di sekitar trans Papua. Demi turut membantu perkembangan di sekitar trans Papua, Bappenas memetakan potensi tiap segmen untuk dijadikan kawasan pemukiman terpadu pertanian, perkebunan, atau pariwisata baru agar trans Papua bermanfaat bagi masyarakat sekitar (indonesia.go.id, 2019)..

Fasilitas perbatasan ditingkatkan melalui Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) salah satunya di wilayah Skouw. Pembangunan PLBN Skouw tidak hanya menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, yang terpenting adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pembangunan meliputi berbagai fasilitas pendukung dan akses dari Jayapura, kota terdekat. Dengan semakin banyak fasilitas yang ditingkatkan dapat mempermudah aksesibilitas antara masyarakat Papua dengan Papua Nugini. Perbaikan fasilitas akan semakin menguatkan fungsi PLBN sebagai tempat berinteraksi, perekonomian, dan sebagai gambaran terdepan wilayah Indonesia yang diperhatikan dunia internasional (Annaf, 2020).

Peningkatan HAM sangat penting bagi nilai-nilai dalam negeri Indonesia. Hal ini sangat terkait dengan subbab selanjutnya karena nilai dalam negeri mempengaruhi kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, Indonesia meningkatkan HAM di Papua melalui pendidikan. Ditambah dengan status masyarakat Papua adalah bagian dari masyarakat Indonesia, maka masyarakat Papua dapat terlibat demokrasi melalui Pemilu baik pemilu lokal maupun pemilu nasional. Serta kebebasan setara dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Pendidikan merupakan HAM mendasar yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia di Papua. Pemerintah Indonesia melakukan beberapa program seperti Sekolah Satu Atap (SATAP), Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (SM3T), dan membaca, menulis, dan berhitung (Calistung). Pertama adalah Program SATAP adalah program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia demi membuka peluang bagi anak-anak yang kurang beruntung atau kurang mampu untuk dapat mengecap pendidikan dasar yaitu sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama. Kedua, program SM3T adalah program Kemenristek Dikti yang mana program ini disandingkan dengan Program Profesi Guru (PPG), karena PPG akan langsung oleh tiap peserta SM3T sebagai bonus pengabdian dalam membantu mencerdaskan kehidupan di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Ketiga, Calistung adalah singkatan dari membaca, menulis, dan berhitung dimana calistung merupakan dasar tahapan orang bisa mengenal huruf dan angka. Banyak pakar menganggap pentingnya calistung untuk mempermudah komunikasi dalam bentuk baca, tulis, dan angka dikarenakan calistung ini banyak didapat dalam pendidikan formal (Pribadi, 2017).

Pemerintah juga mengadakan Jaring Masukan Daerah (Jarmasda) di Jayapura pada 3-4 Juli 2019 untuk memberikan wadah bagi pemangku kebijakan daerah agar turut serta memberi masukan dan informasi terkini terkait upaya pemajuan dan pembangunan HAM di Papua. Beberapa hal yang dibahas antara lain pemenuhan hak anak, hak pendidikan, perlindungan perempuan dari kekerasan, akses terhadap kesehatan, proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM masa lalu, Otonomi Khusus, dan tantangan lainnya (Kemlu, 2019). Dengan masukan tersebut, Kemlu dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait agar peningkatan HAM semakin baik. Sehingga HAM di Papua dapat setara dengan HAM di wilayah lain di Indonesia.

Soft power Indonesia selanjutnya adalah kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia. Sikap ini merupakan kebijakan dari nilai-nilai yang berkembang di Indonesia dan disebarluaskan ke dunia internasional. Nilai tersebut memberikan pemahaman kepada dunia internasional tentang cara pandang Indonesia. Dalam demokrasi, Indonesia mengadakan *Bali Democracy Forum* (BDF) sebagai wadah bertukar pengalaman negara anggota yang sedang melakukan demokratisasi. Selanjutnya, kebijakan luar negeri Indonesia yang mengikuti berbagai institusi internasional dan ikut mempromosikan perdamaian dan HAM.

Reformasi Indonesia menuju demokratis mendorong pemerintah untuk memanfaatkan keberhasilan tersebut. Dengan keberhasilan demokratisasi, Indonesia ingin membantu negara lain yang sedang dalam proses demokratisasi. Hal ini dibuktikan dengan menjadi promotor dalam BDF pada tahun 2008. BDF merupakan forum antarnegara pertama di Asia Pasifik yang berfokus pada kerjasama regional dalam perkembangan bidang demokrasi dan politik (Anwar, 2010). Pada penerapannya, BDF merupakan wadah untuk saling bertukar pengalaman dan menguatkan proses demokratisasi di masing-masing negara anggota. BDF menekankan pentingnya kesetaraan, dialog yang bersifat membangun, saling menghargai dan memahami untuk mencapai kerjasama demokrasi (Sutiono, et al., 2008, p. 8).

Tabel 3.1 Kehadiran BDF berdasarkan wilayah dan organisasi internasional

Regional Representation	BDF 1	BDF 2	BDF 3	BDF 4	BDF 5	BDF 6
East Asia and the Pacific	17	16	20	16	13	20
Middle East	7	6	12	14	11	14
South and Central Asia	8	13	12	8	14	11
Central and Eastern Europe		1	5	12	18	12
Western Europe		10	14	14	13	15
South America and the Caribbean			2	4	3	4
Africa			2	6	3	8
North and Central America		2	2	3	2	3
International Organization			2	4	7	8
Total	32	48	71	81	84	95

Sumber: Karim, 2016

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa meskipun partisipasi BDF semakin meningkat, hal tersebut tidak membuktikan bahwa Indonesia berhasil mempromosikan demokrasi. BDF juga tidak mengikat anggotanya untuk mencapai demokrasi tertentu. Akan tetapi, peningkatan partisipasi menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pemain penting dalam mempromosikan demokrasi di Asia Pasifik. Dengan BDF, Indonesia dapat memberi ruang komunikasi bagi MSG untuk saling berdiskusi dan melibatkan partisipasi kerjasama regional (McDowell, 2018). Kehadiran MSG di BDF memberikan konsekuensi yang memungkinkan negara-negara MSG mengurangi intensitas dukungan terhadap ULMWP dengan menjunjung tinggi nilai dan asas demokrasi termasuk di dalamnya tidak mencampuri urusan negara lain (Hasyim, 2017).

Respon bervariasi ditunjukkan oleh negara anggota MSG. Menurut menteri luar negeri dan kerjasama internasional Fiji, Ratu Inoke Kubuabola dalam BDF III mengatakan bahwa Fiji sangat berterima kasih kepada Indonesia karena telah diundang dalam forum BDF. Ia merasa terhormat karena dapat berbagi pengalaman tentang demokrasi yang ada di Fiji. Fiji berpandangan bahwa demokrasi dan pembangunan saling terkait satu dengan yang lain sesuai dengan BDF. Dibawah kerangka *Strategic Framework for Change* (SFC) hasil BDF II, Fiji mengembangkan pembangunan ekonomi sebagai fokus utama dengan mengeluarkan kebijakan yang berbasis pertumbuhan dan antikemiskinan (Elias, et al., 2010, pp. 90-91).

Sejalan dengan Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Vanuatu sangat mengapresiasi Bali Demokrasi Forum. Menteri luar negeri dan perdagangan Kepulauan Solomon Mr. Peter Shanel Agovaka memuji pemerintah Indonesia dengan karena mengadakan forum dan memberi kesempatan setiap negara untuk saling berbagi pengalaman demokrasi (Elias, et al., 2010, p. 94). Papua Nugini yang diwakili oleh menteri pertanian dan peternakan, Ano Pala memberikan respon positif dengan mengatakan bahwa Papua Nugini siap mendukung BDF agar meningkatkan pemahaman regional, kerjasama, dan perdamaian (Elias, et al., 2010, p. 126). Berbeda dengan ketiga negara diatas, Vanuatu tercatat hanya sekali terlibat BDF. Hal ini disebabkan oleh kondisi politik dalam negerinya. Namun, meskipun hanya sekali, menteri luar negeri Vanuatu Meltek Sato Kilman Livtuvanu sangat memuji BDF karena merupakan forum bagi negara kecil dan besar untuk berkumpul, berbagi, dan berdiskusi tentang prinsip demokrasi di negaranya (Damazo-Santos, 2014).

BDF tidak hanya dihadiri oleh perwakilan negara saja, tetapi organisasi internasional salah satunya MSG. Romulo Nayacalevu yang menjabat sebagai manajer tata kelola pemerintahan dan urusan hukum di MSG menjadi wakil di BDF. Ia mengatakan bahwa BDF memberikan kesempatan MSG untuk semakin terlibat dalam kerjasama regional. BDF juga sejalan dengan MSG 2038 Prosperity for All Plan yaitu menciptakan stabilitas kawasan, *good governance*, perdamaian abadi, dan persatuan untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan (dailypost.vu, 2018).

Sejalan dengan nilai demokrasi, HAM menjadi perhatian Indonesia sebagai *soft power*. HAM sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM tahun 1948 (Kemlu, 2019). Dalam institusi internasional, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan sesi inaugural *Independent Permanent Human Rights Commission of the Organization of Islamic Cooperation* (IPHRC OIC). Pertemuan ini telah memainkan peran penting dalam proses pembentukan serta pelaksanaan kinerja dari IPHRC OKI yang berisi tentang HAM yang ada di negara-negara muslim. Indonesia juga terlibat aktif dalam perkembangan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) yang terbentuk pada 23 Oktober 2009, termasuk dalam pemilihan wakil Indonesia dalam AICHR. Peran penting Indonesia lainnya adalah dalam penyusunan Deklarasi HAM ASEAN (Kemlu, 2019).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai terobosan untuk menyelesaikan masalah separatisme dan HAM selain yang telah disebutkan diatas. Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia membebaskan sejumlah tahanan politik tokoh-tokoh yang dikenal sebagai tokoh pendukung kemerdekaan Papua. Salah satunya adalah Filep Karma yang dianggap terbukti menaikkan bendera Bintang Kejora (Henschke, 2016). Bahkan Menko Polhukam Wiranto menyatakan akan mengundang sejumlah perwakilan negara kepulauan Pasifik untuk mengunjungi Indonesia dan juga Papua. Ia menegaskan akan lebih baik jika perwakilan negara kepulauan Pasifik datang langsung ke Indonesia untuk melihat situasi dan kondisi sebenarnya (Mahendra, 2018). Disamping melihat situasi secara langsung, kunjungan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintahan Indonesia yang berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran, termasuk Papua (Sukmana, 2018).

Soft power juga dapat dibentuk oleh institusi internasional. Negara dapat menarik dengan menyebarkan nilai-nilai dalam negeri dan menyalurkannya melalui institusi internasional. Dengan begitu, Institusi internasional membantu negara untuk membangun pandangan masyarakat dunia tentang nilai-nilai universal yang ada di dalam negeri seperti perdamaian dan HAM (Nye, 2004, p. 177). Sebagai negara yang menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, kehadiran Indonesia dalam berbagai institusi internasional membantu Indonesia dalam membangun opini baiknya.

Keaktifan Indonesia dalam berbagai institusi internasional dapat menjadi salah satu indikasi ketertarikan MSG untuk bekerjasama dengan Indonesia. Dengan membuka kerjasama, maka Indonesia memberikan pengalaman dan tantangan yang dihadapi di masing-masing institusi. Dalam dunia internasional, Indonesia aktif dalam PBB terutama masuknya Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020. Di Pasifik selatan, Indonesia menginisiasi SwPD yang bertujuan untuk membuka ruang diskusi bagi negara Pasifik dalam menghadapi tantangan kedepan (Santarita, 2002).

Melalui Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB, Indonesia aktif memperjuangkan perdamaian dan keamanan dunia dengan mengimplementasikan perjanjian damai secara komprehensif dan membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa Indonesia berlandaskan UUD 1945 dengan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagai nilai dalam negeri untuk melaksanakan kebijakan luar negeri.

Selanjutnya, Indonesia memperjuangkan perdamaian dan keamanan dunia dengan ikut serta menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun, mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Wakil tetap RI di PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani mengatakan besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang penting dalam menjaga perdamaian dunia (VOAIndonesia.com, 2019). Salah satu dari empat isu prioritas Indonesia dalam DK PBB adalah membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dalam hal ini ditekankan perlunya penguatan organisasi regional (Kemlu, 2019).

Pembuktian *soft power* Indonesia dalam kancah internasional dibuktikan dengan tergabungnya Indonesia, Fiji, dan Papua Nugini dalam Komite Khusus PBB untuk Dekolonialisasi. Dalam komite tersebut, ketiga negara mendukung keberadaan FLNKS di Pasifik. Tetapi, Fiji dan Papua Nugini menunjukkan sikap terbalik dengan tidak mendukung penyelesaian Papua di PBB. Hal tersebut berlanjut pada ketidakhadiran perdana menteri dan menteri luar negeri Papua Nugini untuk datang ke pertemuan puncak MSG di Noumea, Kaledonia baru tahun 2013. Kehadiran pemimpin Papua Nugini di Jakarta ketika MSG memperdebatkan Papua Barat menunjukkan prioritas yang diberikan Papua Nugini dalam isu Papua (Maclellan, 2015, p. 275).

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan konsep *soft power* untuk menganalisis fenomena keterlibatan Indonesia di MSG untuk membendung ULMWP. Peneliti berhasil menemukan jawaban dari rumusan masalah berupa Indonesia memiliki tiga instrumen *soft power* yaitu budaya, nilai-nilai dalam negeri, dan kebijakan luar negeri. Ketiga instrumen tersebut saling menguatkan sehingga melancarkan tujuan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu membendung keanggotaan ULMWP di MSG. Dengan *soft power* tersebut, Indonesia dapat mendapatkan apa yang diinginkan yaitu tidak diakuinya ULMWP secara internasional oleh negara anggota MSG dan menjadikan Indonesia berdaulat dan berhak atas Papua.

REFERENSI

- Annaf, M., 2020. *Pembangunan PLBN Terpadu Skouw Dukung Geliat Ekonomi Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini*. [Online] Available at: <https://www.portonews.com/2020/laporan-utama/pembangunan-plbn-terpadu-skouw-dukung-geliat-ekonomi-kawasan-perbatasan-indonesia-papua-nugini/> [Diakses 6 Februari 2020].
- Anwar, D. F., 2010. The impact of domestic and Asian regional changes on Indonesian foreign policy. *Southeast Asian Affairs*, pp. 126-141.

- Bere, S. M., 2015. *7 Negara Siap Hadiri Festival Budaya Melanesia di NTT*. [Online] Available at: <https://travel.kompas.com/read/2015/10/10/112600327/7.Negara.Siap.Hadiri.Festival.Budaya.Melanesia.di.NTT> [Diakses 1 November 2019].
- BPNBBali, 2015. *Festival Budaya Melanesia 2015*. [Online] Available at: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/festival-budaya-melanesia-2015/> [Diakses 13 Oktober 2019].
- dailypost.vu, 2018. *MSG Secretariat attends 11th Democracy Forum in Indonesia*. [Online] Available at: https://dailypost.vu/news/msg-secretariat-attends-th-democracy-forum-in-indonesia/article_ce5bd484-997f-5f88-9760-a7abc6ec7c89.html [Diakses 19 Desember 2019].
- Damazo-Santos, J., 2014. *What has the Bali Democracy Forum achieved?*. [Online] Available at: <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/71662-bali-democracy-forum> [Diakses 19 Desember 2019].
- Dewi, S., 2018. *Indonesia Gagalkan Upaya Kelompok Pro Papua Merdeka di KTT Negara Melanesia*. [Online] Available at: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/indonesia-gagalkan-upaya-kelompok-pro-papua-merdeka-di-ktt-negara-melanesia-1/full> [Diakses 3 September 2018].
- Elias, G. et al., 2010. *Speeches and Proceedings Bali Democracy Forum III "Democracy and the Promotion of Peace and Stability"*. Bali, Department of Foreign Affairs Republic of Indonesia.
- Firmansyah, T., 2018. *MSG Tolak Keinginan Separatis Papua Jadi Anggota Penuh*. [Online] Available at: <https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/02/15/p470gj377-msg-tolak-keinginan-separatis-papua-jadi-anggota-penuh> [Diakses 3 September 2018].
- Hasyim, M. M. A., 2017. *Diplomasi Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap Penjagaan Kedaulatan NKRI di Papua Barat Periode 2013-2016*. Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Henschke, R., 2016. *Filep Karma: Pembangunan Papua bukan untuk rakyat Papua*. [Online] Available at: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160503_bincang_filepkarma [Diakses 26 November 2019].
- indonesia.go.id, 2019. *Jalan Trans Papua Hampir Tersambung*. [Online] Available at: <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/jalan-trans-papua-hampir-tersambung> [Diakses 6 Februari 2020].
- Kemlu, 2011. *Persahabatan, Modal dalam Diplomasi*. [Online] Available at: <https://www.tabloiddiplomasi.org/persahabatan-modal-dalam-diplomasi/> [Diakses 4 November 2019].
- Kemlu, 2012. *Partisipasi Indonesia Sebagai Observer pada KTT Khusus Melanesian Spearhead Group (MSG)*. [Online] Available at: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Partisipasi-Indonesia-Sebagai-Observer-pada-KTT-Khusus-Melanesian-Spearhead-Group-MSG.aspx> [Diakses 23 Oktober 2018].
- Kemlu, 2015. *Indonesia Acquires Associate Member Status In Melanesian Spearhead Group (MSG)*. [Online] Available at: <https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Indonesia-Acquires-Associate-Member-Status-In-Melanesian-Spearhead-Group-MSG.aspx> [Diakses 3 September 2018].
- Kemlu, 2019. *Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. [Online] Available at: https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia [Diakses 25 November 2019].

- Kemlu, 2019. *Institusi HAM di ASEAN dan OKI*. [Online] Available at: https://kemlu.go.id/portal/i/read/104/halaman_list_lainnya/institusi-ham-di-asean-dan-oki [Diakses 25 November 2019].
- Kemlu, 2019. *Keanggotaan Indonesia pada DK PBB*. [Online] Available at: https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb [Diakses 27 November 2019].
- Kemlu, 2019. *Perkuat Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan, Kemlu Adakan Jaringan Masukan Daerah di Papua*. [Online] Available at: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/438/berita/perkuat-koordinasi-dengan-pemangku-kepentingan-kemlu-adakan-jaring-masukan-daerah-di-papua> [Diakses 8 Februari 2020].
- Kurnia, M., 2016. The Indonesian Arts and Culture Scholarship as an Instrumentality of Cultural Diplomacy Indonesia. *EJurnal Unisri*, I(29), pp. 1-55.
- Maclellan, N., 2015. *The New Pacific Diplomacy*. Canberra: ANU Press.
- Mahendra, D. I., 2018. *Wiranto Undang Negara Pasifik Kunjungi Papua*. [Online] Available at: <https://mediaindonesia.com/read/detail/156847-Wiranto-Undang-Negara-Pasifik-Kunjungi-Papua> [Diakses 26 November 2019].
- McDowell, M., 2018. *International IDEA at the Bali Democracy Forum*. [Online] Available at: <https://www.idea.int/news-media/news/international-idea-bali-democracy-forum> [Diakses 10 November 2019].
- MSG, 2011. *Theme: "Melanesian Solidarity for a Progressive and Strong Pacific"*. [Online] Available at: <http://www.msgsec.info/index.php/vacancies/79-msg-summit-2011> [Diakses 19 September 2018].
- MSG, t.thn. *Brief about MSG*. [Online] Available at: <http://msgsec.info/index.php/members/brief-about-msg> [Diakses 3 September 2018].
- Nye, J. S., 2004. *Soft Power: the Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs.
- Onwestpapua.com, 2018. *Uncover Melanesian in Indonesia*. [Online] Available at: <https://onwestpapua.com/uncover-melanesian-indonesia/> [Diakses 3 November 2019].
- Pribadi, R. E., 2017. Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Papua. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, V(3), pp. 928-929.
- Pulungan, M. S., 2003. *Dinamika Konflik Di Papua Pasca Orde Baru*. [Online] Available at: jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1423/1343 [Diakses 29 Maret 2019].
- Santarita, J. B., 2002. Southwest Pacific Dialogue: Indonesia's Newest Leverage in the Asia Pacific. *Asian Studies*, 38(2), pp. 121-135.
- Sukmana, Y., 2018. *Wiranto Sebut RI Berupaya Ubah Citra di mata Negara-negara Pasifik Selatan*. [Online] Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/25/15381961/wiranto-sebut-ri-berupaya-ubah-citra-di-mata-negara-negara-pasifik-selatan> [Diakses 26 November 2019].
- Suryawan, I. N., 2011. Satu Setengah Tahun Otsus Papua: Refleksi dan Prospek. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(2), pp. 143-144.
- Sutiono, P. et al., 2008. *Speeches and Proceedings Bali Democracy Forum "Building and Consolidating Democracy: a Strategic Agenda for Asia"*. Bali, Department of Foreign Affairs Republic of Indonesia.
- ULMWP, t.thn. *About ULMWP*. [Online] Available at: <https://www.ulmwp.org/about-ulmwp> [Diakses 12 September 2018].
- VOAIndonesia.com, 2019. *Indonesia Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB*. [Online] Available at: <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-resmi-anggota-dewan-keamanan-pbb/4726303.html> [Diakses 27 November 2019].